

Yudo Margono Janji Telusuri Kabar Pensiunan TNI Jadi Beking Tambang Ilegal

Panglima TNI Laksamana Yudo [Berita Olahraga Terbaru](#) Margono janji akan mencari info masalah pensiunan TNI yang membeking tambang ilegal sampai mafia tanah Yudo akan kerahkan unit yang berada di TNI, dari POM, intel, sampai Dinas Penyelamatan Angkatan.

"Tentu saja karena ada informasi semacam itu kita check dahulu, saya telah berikan reformasi birokrasi dan organisasi tentu saja harus bersih semua," kata Yudo selesai dikukuhkan Jokowi jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Awalnya, kasus mafia tambang sampai tanah ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dia menyentuh masalah sikap aparaturnya sebagai perlindungan untuk tambang ilegal. Dia mengatakan aparaturnya susah ungkap kasus tambang ilegal karena adanya elemen senioritas.

"Belum juga ada beking-beking, aparaturnya yang membeking satu tambang. Kita tidak dapat tuntaskan karena senior yang membeking," tutur Mahfud dalam Rapat Kerja Nasional (Rapat kerja nasional) Satuan tugas Saber Pungutan liar di Jakarta, Selasa, yang disiarkan di Youtube Kemenko Polhukam, 14 Desember.

Ia menyebutkan, ada aparaturnya yang membeking penarikan pungutan di suatu kompleks warga hingga tidak ada yang berani ambil perlakuan. "Kita harus membuat batasan, perlakuan apa yang dapat kita kerjakan untuk menangani ini," kata Mahfud.

Selanjutnya, ia menerangkan tentang pemberian izin usaha pertambangan dan hak pemberdayaan rimba (HPH) yang bisa bikin rugi negara. Walau begitu, hal pemberian izin itu masih tetap diberi dengan cara sah, yang membuat pemerintahan harus menanti sampai periodenya habis.

"Jika kita langsung cabut jangannya, itu menyalahi hukum. Hingga mengakibatkan banyak permasalahan yang dahulu disewakan secara kolusif," ucapnya menerangkan.

Pada 19 Desember, Mahfud kembali menyentuh masalah praktek ilegal yang mengikutsertakan aparaturnya dan pensiunan TNI ini.

Menurutnya, banyak kasus mafia tidak cuma tambang ilegal, tetapi juga mafia tanah dan yang lain susah sekali untuk dituntaskan.

"Saat akan dituntaskan, masalah itu jadi susah karena satu diantaranya ada pelaku aparaturnya penegak yang membekingi," kata Mahfud.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga akui sudah mengirim team untuk menuntaskan jumlahnya laporan yang diterimanya. Tapi, saat petinggi penegak hukumnya yang hendak menuntaskan masalah itu sudah dipindahkan dan diberikan ke petinggi baru, karena itu petinggi baru itu malas untuk menuntaskan karena akui tidak paham.

"Semestinya masalah itu simpel untuk dituntaskan. Tetapi, realitanya jadi sulit untuk dituntaskan, apa lagi jika mengikutsertakan petinggi negara," katanya.

Mahfud juga sempat menanyakan ke Sekretaris Menko Polhukam berkaitan dampak seorang petinggi militer yang sudah pensiun. Tentara yang telah pensiun tak lagi mempunyai dampak.

"Di laporan saya tuch banyak membeking orang? membekingi mafia. Jenderal inilah jenderal ini. Tidak pak, tidak punya kemampuan. Nach jika demikian saya ngomong mengambil, saya berikan ke polisi, mengambil. Orang telah pensiun kok masih ini. Lantas ingin memakai apa? Kemungkinan sesaat lagi ada informasi terdakwa," katanya.

Masalah membekingi itu, lebih ia, telah lama terjadi, tetapi tidak ada yang berani untuk mengungkapkannya. "Saya anggap telah lama ini hanya tidak ada yang berani bicara saja. Beking-bekingan dari dahulu," kata Mahfud memperjelas.

Tetapi ini hari, Mahfud malas menerangkan kembali masalah aparaturnya atau pensiunan TNI dibalik praktek ilegal ini. "Aduh kok itu terus ya, kan sudah banyak setiap hari, sudah banyak di koran," katanya.

Dalam pada itu, Mabes Polri juga memberi respon pengakuan Mahfud. Kepala Seksi Jalanan Warga Mabes Polri Inspektur Jendral Dedi Prasetyo janji selekasnya tindak lanjuti bila ada penemuan itu.

Dedi berkata Polri tindak lanjuti semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, terhitung dalam masalah ini usaha tambang ilegal. Faksi yang berkuasa, menurut Dedi, akan selekasnya turun bila diketemukan bukti-bukti yang cukup.

"Pada konsepnya jika ada faktanya, penyidik Dittipiter Bareskrim Polri dan polda akan dilakukan tindakan," kata Dedi melalui pesan tercatat, Kamis 15 Desember 2022.

Presiden Jokowi minta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono supaya jaga netralitas prajuritnya.

Jokowi cuma menyebutkan jika pendekatan humanis yang dijanjikannya Yudo Margono itu sebagai usaha yang bagus.

Mahfud Md menjelaskan akan membahas masalah KKB OPM di Papua dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Akan koordinir di kantor Wakil presiden.

Selainnya Presiden Jokowi berikut barisan menteri di kabinetnya yang lulusan UGM. Diantaranya Pratikno, Retno LP Marsudi dan Budi Kreasi Sumadi.

Presiden Jokowi sah mengangkat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Sempat salah sebut sumpah jadi sikap.

Ketua Federasi Korban KSP Indosurya Teddy Adrian menjelaskan sudah mengirim surat ke Menkopolkam untuk audiensi dengan Mahfud Md.

Kagama, katanya, seperti sepiring gado-gado yang didalamnya bermacam background tetapi mempunyai cita-rasa nusantara.

Presiden Jokowi ini hari akan mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI gantikan Jenderal Andika Gagah. Janji Yudo masalah Papua.

Presiden Jokowi esok akan mengangkat Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI gantikan Jenderal Andika Gagah.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Letkol Tituler memetik kontra dan pro. Berikut beragam komentar beberapa figur masalah itu.